



Kajian Kebijakan Strategis Dalam Pencegahan Stunting Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua

Frans Manangsang¹, Ester Rumaseb¹, Ellen R.V Purba^{1*}, I Ketut Swastika¹, Dorci Nuburi¹

¹Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, Papua

* Corresponding author: ellen.purba5@gmail.com

Received 4 Juni 2024; Received in revised 21 Juni 2024; Accepted 26 Juni 2024

Abstract: *There has been an increase in access to health services and community participation in stunting prevention in the Papua Region, but significant challenges exist in infrastructure limitations, shortage of health workers, geographical isolation, and cultural barriers in stunting prevention. The purpose of the study is to evaluate strategic policies in stunting prevention in Keerom Regency, Papua Province, by highlighting specific and sensitive nutrition interventions, as well as educational campaigns that have been implemented. The research method used is a case study by examining stunting handling policies. Data collection was carried out with a focus on group discussion and round table discussion. Data analysis uses qualitative and quantitative methods. The results of the study show that strategic policies in stunting prevention in Keerom Regency, Papua Province, have included specific and sensitive nutrition interventions, as well as effective educational campaigns in increasing public awareness about the importance of balanced nutrition. Nonetheless, the study identified key challenges that hindered the effectiveness of the policy, including infrastructure limitations, shortages of health workers, and geographical isolation. In addition, local cultural habits also play a role in hindering the implementation of good nutrition practices. To increase the effectiveness of this policy, recommendations include improving infrastructure, adding and training health workers, and adjusting the approach of education campaigns to be more in line with the local cultural context.*

Keyword: Stunting, Policy, Papua

Abstrak: Terjadi peningkatan akses layanan kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting di Wilayah Papua, akan tetapi tantangan signifikan terdapat pada keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga kesehatan, isolasi geografis, dan hambatan budaya dalam pencegahan stunting. Tujuan penelitian yaitu mengevaluasi kebijakan strategis dalam pencegahan stunting di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dengan menyoroti intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta kampanye edukasi yang telah diimplementasikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dengan mengkaji kebijakan penanganan stunting. Pengumpulan data dilakukan dengan fokus group discussion dan round table discussion. Analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan strategis dalam pencegahan stunting di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, telah mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta kampanye edukasi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Meskipun demikian, penelitian mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut, termasuk keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga kesehatan, dan isolasi geografis. Selain itu, kebiasaan budaya lokal juga memainkan peran dalam menghambat penerapan praktik gizi yang baik. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan infrastruktur, penambahan dan pelatihan tenaga kesehatan, serta penyesuaian pendekatan kampanye edukasi yang lebih sesuai dengan konteks budaya lokal.

Kata Kunci: Stunting, Kebijakan, Papua



PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, yang jika tidak ditangani dapat mengakibatkan konsekuensi jangka panjang masyarakat. Di Indonesia, prevalensi stunting masih menjadi masalah serius, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang seperti Kabupaten Keerom di Provinsi Papua^{1,2}. Kabupaten ini memiliki angka stunting yang tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, mencerminkan tantangan besar dalam hal aksesibilitas, kualitas layanan kesehatan, dan infrastruktur pendukung³.

Papua terdiri dari 29 Kabupaten/Kota dan merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki angka stunting masih tinggi (29,5%) bahkan melebihi angka Nasional (24,4%). Kabupaten yang memiliki angka stunting terendah adalah Nabire yaitu 20,6% dan Kabupaten yang tertinggi angka stuntingnya adalah Pegunungan Bintang yaitu 55,4%. Sedangkan di Kabupaten Keerom yaitu 25,9% yang tersebar pada distrik Distrik Arso Barat (110 balita), Distrik Waris (100 balita), Distrik Arso (14 balita), Distrik Skanto (35), Distrik Mannem (25 balita), Distrik Arso Timur (20 balita), Distrik Towe (14 balita), Distrik Yaffi (10 balita) dan Distrik Senggi (6 balita). Angka ini menunjukkan rentang yang besar antara kabupaten yang terendah dan tertinggi⁴.

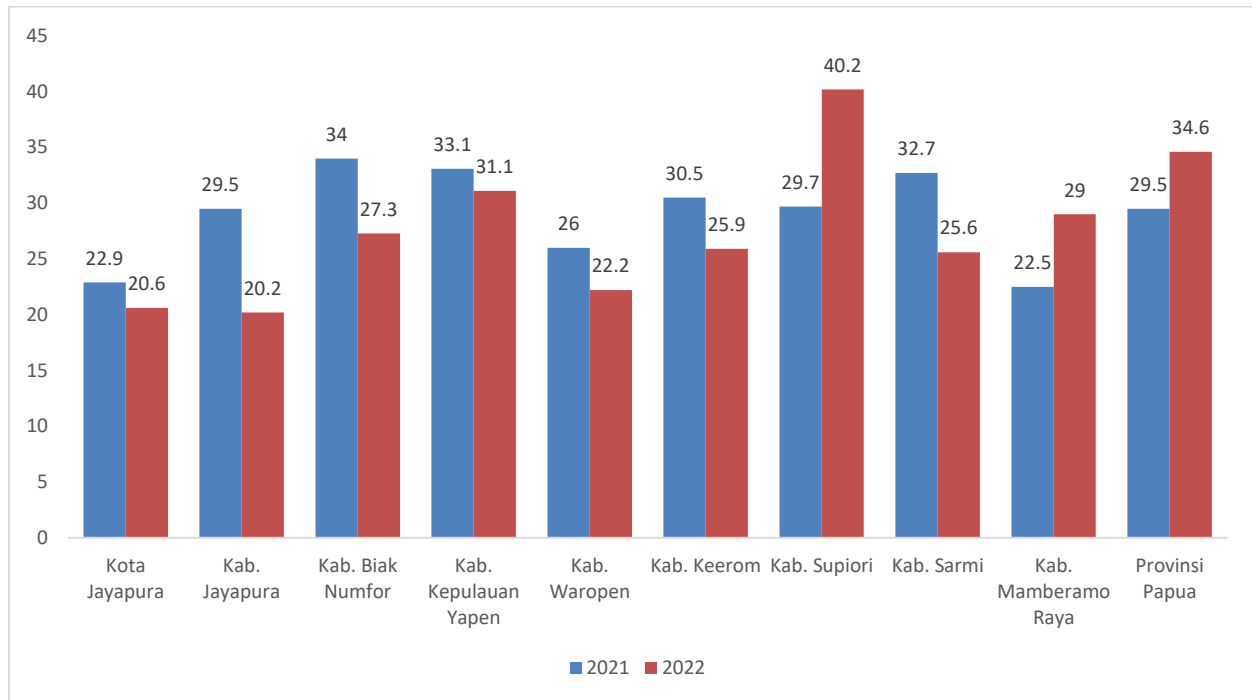
Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi pencegahan stunting sebagai prioritas nasional, mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk menanggulangi masalah ini⁵. Kebijakan strategis yang diterapkan meliputi intervensi gizi spesifik, seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan, serta intervensi gizi sensitif, seperti peningkatan akses air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar⁶. Selain itu, edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan praktik kesehatan yang baik juga telah dilaksanakan. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Keerom menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga kesehatan, serta isolasi geografis yang membuat beberapa daerah sulit dijangkau. Selain itu, kebiasaan dan kepercayaan lokal sering kali tidak sejalan dengan praktik gizi dan kesehatan yang direkomendasikan, sehingga menyulitkan pelaksanaan program secara efektif^{7,8}.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan strategis dalam pencegahan stunting di Kabupaten Keerom. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam implementasi kebijakan, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dan kontekstual untuk menurunkan prevalensi stunting di daerah tersebut. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih terfokus dan berkelanjutan untuk pencegahan stunting di Kabupaten Keerom dan daerah-daerah lain dengan kondisi serupa.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode studi kasus untuk mengevaluasi kebijakan strategis dalam pencegahan stunting di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Data dikumpulkan dengan teknik *pupusive sampling* melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah (1 informan), petugas kesehatan (1 informan), tokoh masyarakat (1 informan), dan keluarga yang terdampak stunting (3 informan). Selain itu, *focus group discussion* (FGD) dan *round table discussion* (RTD) dengan perwakilan dari dinas kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal yang berjumlah 5 informan dilakukan untuk mengumpulkan pandangan dan pengalaman terkait kebijakan pencegahan stunting. Observasi lapangan dilakukan di beberapa desa dan fasilitas kesehatan untuk memperoleh data kontekstual (frekuensi kejadian stunting di Papua) mengenai kondisi lapangan dan interaksi antara petugas kesehatan dan masyarakat. Analisis dokumen kebijakan nasional dan daerah, laporan pelaksanaan program, serta data statistik kesehatan juga dilakukan untuk memahami kerangka kebijakan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Validasi data dilakukan melalui triangulasi berbagai sumber data dan member checking untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian. Persetujuan informan diperoleh sebelum partisipasi, dan kerahasiaan data dijaga dengan menyamarkan identitas informan dalam laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Data Kejadian Stunting di Provinsi Papua

Berdasarkan data stunting di Papua pada tahun 2022, terdapat peningkatan kasus sebesar 5,1% dibandingkan tahun 2021, dengan angka mencapai 34,6%. Sementara itu, di Kabupaten Keerom, terjadi penurunan kasus stunting dari 30,5% pada tahun 2021 menjadi 25,9% pada tahun 2022, yang menunjukkan penurunan sebesar 4,6%. Walaupun terjadi penurunan angka stunting, akan tetapi belum mencapai standar yang telah ditentukan oleh WHO yaitu <20% per daerah. Penelitian juga mengidentifikasi berbagai kebijakan strategis yang telah diterapkan dalam pencegahan stunting di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Kebijakan tersebut meliputi intervensi gizi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan dan suplemen vitamin, serta intervensi gizi sensitif yang mencakup peningkatan akses air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar. Edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan praktik kesehatan juga merupakan bagian integral dari kebijakan yang telah dibuat. Hasil wawancara dengan pakar dan observasi lapangan menunjukkan bahwa beberapa program telah berhasil meningkatkan akses layanan kesehatan dan partisipasi masyarakat, terutama di daerah yang lebih mudah dijangkau. Program tersebut telah mampu menurunkan 4,6% dari kasus stunting di Kabupaten Keerom.

Hasil penelitian juga menemukan berbagai tantangan yang signifikan dalam implementasi kebijakan tersebut berupa keterbatasan infrastruktur, seperti jalan yang buruk dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai, menghambat distribusi bantuan dan pelaksanaan program di daerah terpencil. Kekurangan tenaga kesehatan yang terlatih dan isolasi geografis membuat banyak wilayah sulit dijangkau, sehingga intervensi tidak merata. Selain itu, kebiasaan dan kepercayaan lokal yang tidak mendukung praktik gizi yang baik menjadi hambatan dalam penerimaan dan efektivitas program.

Keberhasilan sebagian program pencegahan stunting di Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa intervensi yang terencana dengan baik dapat memberikan dampak positif. Peningkatan akses layanan kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam program-program edukasi merupakan indikasi bahwa kebijakan ini berjalan sesuai rencana di beberapa wilayah. Namun, tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa kebijakan ini memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk mencapai cakupan yang lebih luas dan efektif⁹. Keterbatasan infrastruktur adalah salah satu kendala utama yang menghambat efektivitas kebijakan¹⁰. Tanpa adanya akses jalan yang baik dan fasilitas kesehatan yang memadai, akan menghambat

distribusi makanan tambahan dan suplemen, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan infrastruktur dasar sangat diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan pencegahan stunting¹¹.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kekurangan tenaga kesehatan terlatih menjadi masalah yang serius. Pelatihan dan penambahan tenaga kesehatan harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa semua daerah, terutama yang terpencil, memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas¹². Selain itu, pendekatan yang lebih kontekstual dalam edukasi diperlukan untuk mengatasi hambatan budaya. Mengintegrasikan pemahaman tentang kebiasaan dan kepercayaan lokal dalam program edukasi dapat meningkatkan penerimaan dan efektivitas intervensi¹³. Peneliti berpendapat bahwa pentingnya pendekatan holistik dan terintegrasi dalam pencegahan stunting. Intervensi teknis harus dipadukan dengan pendekatan sosial dan budaya yang mendalam untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Rekomendasi untuk peningkatan infrastruktur, penambahan dan pelatihan tenaga kesehatan, serta penyesuaian edukasi yang lebih sesuai dengan budaya lokal dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Keerom dan wilayah lain yang memiliki kondisi serupa.

Rekomendasi yang peneliti berikan atas perbaikan kebijakan yang dilakukan yaitu :

1. Setiap Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus segera di follow up dengan peningkatan koordinasi lintas sektor
2. Kebijakan yang dikeluarkan harus mendapatkan pengawalan dan ada power yang mengikat, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.
3. Peningkatan Monitoring dan evaluasi pada semua program dan kegiatan
4. Program kegiatan Stunting harus memprioritaskan pada desa lokus stunting, sehingga program intervensi tepat sasaran.
5. Pelatihan petugas Kesehatan yang rutin dan berkelanjutan, agar validitas data terjamin, dan meningkatkan kelengkapan dan ketepatan data.
6. Pemerintah kabupaten/kota mengoordinasikan kecamatan/ Distrik dan pemerintah desa/ Kampung dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data.
7. Feed back terhadap hasil monitoring dan evaluasi kegiatan, sehingga menjadi motivasi untuk kegiatan selanjutnya.
8. Perkuat Kerjasama dan Kolaborasi Terintegrasi Lintas Sektor
9. Meningkatkan komunikasi risiko, kampanye stunting pada masyarakat, menuju perubahan perilaku positif dalam penurunan stunting.
10. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan (PKK, Kader Posyandu, Kader Kesehatan, KPM, Dasa Wisma, dll). Menumbuhkan kembangkan Kampung Sehat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan strategis dalam pencegahan stunting di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, telah mencakup berbagai intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta edukasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan praktik kesehatan. Meskipun beberapa program telah berhasil meningkatkan akses layanan kesehatan dan partisipasi masyarakat, masih terdapat tantangan signifikan yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga kesehatan, isolasi geografis, serta hambatan budaya dan kebiasaan lokal menjadi faktor utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan cakupan dan keberhasilan program. Peneliti menekankan pentingnya pendekatan holistik dan terintegrasi yang menggabungkan intervensi teknis dengan pendekatan sosial dan budaya yang mendalam. Untuk memperbaiki dan memperkuat kebijakan pencegahan stunting, rekomendasi utama mencakup peningkatan infrastruktur dasar, penambahan dan pelatihan tenaga kesehatan, serta penyesuaian kampanye edukasi agar lebih sesuai dengan konteks budaya lokal. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan efektivitas kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Keerom dapat ditingkatkan, sehingga prevalensi stunting dapat

berkurang secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rai Ngardita I, Sumardi RN, Lusiana SA, Mataram IKA, Yunianto AE. The influence of factors of breastfeeding and food consumption on stunting incidence among preschool children in keerom district, Papua province, Indonesia. *Open Access Maced J Med Sci*. 2021;9(E):559-565. doi:10.3889/oamjms.2021.6076
2. Wulan N, Mofu RM, Amiruddin A. Analisis Karakteristik Ibu, Perilaku Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak Terhadap Kejadian Stunting Balita Di Kabupaten Kerom. *J Ilm Obs*. 2022;14(3):101-111. doi:https://doi.org/10.36089/job.v14i3.777
3. Prasetya MN, Syahrudin, Haris U, Adam AF. Optimalisasi Peran Pemerintah dan BPJS Kesehatan Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Merauke. *Humanis*. 2024;16(1):29-38. doi:https://doi.org/10.52166/humanis.v16i1.5565
4. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2022. <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/%0Acontents/attachments/09fb5b8ccfd088080f2521ff0b4374f.pdf>
5. Khasanah EN, Purbaningrum DG, Andita C, Setiani DA. Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *J Akuntan Publik*. 2023;1(2):217-231. doi:https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i2.482
6. Prahastuti BS. Kajian Kebijakan: Kemitraan Publik Swasta Penanggulangan Stunting di Indonesia Dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *J Ilm Kesehat*. 2020;12(1):52-61. doi:10.37012/jik.v12i1.124
7. Sazali, Utami. *Komunikasi Kebijakan Publik: Penanganan Stunting Berbasis Agama Dan Budaya Di Indonesia*. Merdeka Kreasi Group; 2023.
8. Media Y, Elfemi N. Permasalahan Sosial Budaya Dan Alternatif Kebijakan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Pada Balita Di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. *J Ekol Kesehat*. 2021;20(1):56-68. doi:10.22435/jek.v20i1.4130
9. Imanuel Hadi N. Challenges and Opportunities of Collaborative Governance in Addressing Stunting: Lessons from Papua. *KnE Soc Sci*. 2023;2023:857-866. doi:10.18502/kss.v8i17.14183
10. Tambaip B, Tjilen AP. Analisis Kebijakan Publik Dalam Derajat Kesehatan Di Papua. *J Kebijakan Publik*. 2023;14(1):101. doi:10.31258/jkp.v14i1.8232
11. Briawan D, Khomsan A, Anggiruling DO. Strategi Kerjasama Pemerintah Daerah Sebagai Upaya untuk Percepatan Penurunan Stunting di Maluku dan Papua. *Policy Br Pertanian, Kelautan, dan Biosains Trop*. 2023;5(1):510-514. doi://doi.org/10.29244/agro-maritim.0501.510-514
12. Situmorang HE, Sinaga E. Eksplorasi Pengalaman Tim Kesehatan Stunting di Puskesmas dalam Pencegahan dan Penatalaksanaan Stunting pada Anak di Jayapura Papua. *Manuju Malahayati Nurs J*. 2022;4(11):3004-3021.
13. Wulandari RD, Laksono AD, Kusriani I, Tahangnacca M. The Targets for Stunting Prevention Policies in Papua, Indonesia: What Mothers' Characteristics Matter? *Nutrients*. 2022;14(3):1-10. doi:10.3390/nu14030549